



KOHERENSI KEBIJAKAN FOOD ESTATE DENGAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Chairunisa S. Hakim, Ahmad Syafiq

Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: hakimchairunisa.s@gmail.com

Received 18 Juli 2022 ; **Accepted** 20 Juli 2022 ; **Online Published** 30 Juli 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek aktor, konteks dan proses kebijakan pada koherensi kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen kebijakan, data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Analisis Konten dan Analisis Fenomenologi Transendental digunakan pada penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah 1) teori Koherensi Kebijakan yang dikembangkan oleh Nilsson, 2) teori Segitiga Kebijakan yang dikembangkan oleh Walt and Gilson, serta 3) teori Kerangka Koalisi Advokasi oleh Sabatier & Jenkins sebagai triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koherensi Kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan cukup baik namun belum optimal, sebab tidak ditemukan objektif tertulis mengenai penganekaragaman persediaan pangan yang sesuai dengan skor Pola Pangan Harapan ataupun Gizi Seimbang di dalam kebijakan Food Estate. Interaksi antara aktor, konteks, serta proses pembuatan kebijakan Food Estate berhubungan erat dan saling mempengaruhi koherensi kebijakan. Menggunakan Kerangka Koalisi Advokasi sebagai triangulasi metode, diketahui Organisasi Masyarakat Sipil maupun Pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai ketahanan pangan dan gizi, tetapi Organisasi Masyarakat Sipil memiliki kepercayaan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah mengenai cara yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Kata kunci: ketahanan pangan dan gizi, kebijakan pangan, food estate, koherensi kebijakan

Abstract

The objective of this study is to determine how the actor, context and policy process in coherence of Food Estate policy with the Food Security and Nutrition Policy. This study adopted a qualitative single case study design drawing on in-depth interviews, policy document review and literature study. Content Analysis and Transcendental Phenomenological Analysis were used in this study. The theories used as analytical tools in this research are 1) Policy Coherence theory developed by Nilsson, 2) Policy Triangle theory developed by Walt and Gilson, and 3) Advocacy Coalition Framework theory by Sabatier & Jenkins as a triangulation method. The results show that the coherence of the Food Estate Policy with the Food Security Policy is acceptable but not being at its optimum, because there is no objective written that represent Skor Pola Pangan Harapan or Pedoman Gizi Seimbang. The interactions between actors, context, and policy-making process are closely related and influence policy coherence. Using the Advocacy Coalition Framework as a triangulation method, it is known that both civil society organizations and the government want to achieve food and nutrition security, but civil society organizations have different approaches regarding how to achieve food and nutrition security.

Keywords: food and nutrition security, food policy, food estate, policy coherence

Pendahuluan

Indonesia mengalami perubahan ekonomi dan sosial yang cepat. Pendapatan per kapita, meningkat dari \$2144 pada tahun 2000 menjadi \$4285 pada tahun 2018 (World Bank, 2019). Dengan pesatnya

pertumbuhan ekonomi, pada saat yang bersamaan, Indonesia masih berkuat dengan masalah gizi dan kesehatan. Masih terdapat 30% balita mengalami stunting di tahun 2018 (RISKESDAS, 2018) dan masalah gizi lain belum membaik. Kini,

Indonesia dihadapkan dengan *triple burden of malnutrition* (Rah et al., 2021). Bersamaan dengan stunting, terdapat peningkatan angka kegemukan dan obesitas pada dewasa, dari 19,1% pada tahun 2007 menjadi 35,4% pada tahun 2018, serta persentase anemia pada ibu hamil sebesar 48,9% (RISKESDAS, 2018). *Triple burden of malnutrition* seringkali dikaitkan dengan peningkatan harapan hidup dan pesatnya perkembangan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan ketersediaan pangan, khususnya pangan olahan yang tinggi lemak (R. R. C. Shrimpton, 2013).

Pada tahun 2019, skor Pola Pangan Harapan Indonesia mencapai angka 90,8 (Badan Ketahanan Pangan, 2020). Namun temuan Mehraban & Ickowitz (2021) menunjukkan keanekaragaman konsumsi masyarakat terus turun dari tahun 2000 ke tahun 2015. Menurut, FAO, pola konsumsi pangan di Indonesia tergolong kategori buruk karena konsumsi didominasi karbohidrat, dengan rendahnya asupan protein dan vitamin (FAO, 2021). Menyadari akan adanya tantangan besar ini, pemerintah Indonesia secara resmi menyerukan agar pendekatan yang dilakukan lebih terintegrasi dan multisektor dalam mengatasi masalah-masalah malnutrisi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018) yaitu dengan melaksanakan penanganan yang lebih komprehensif, baik dari sisi intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dari sisi intervensi gizi sensitif, keragaman pangan tidak saja penting dari sisi konsumsi (*demand*) saja, tapi juga dari sisi penyediaan (*supply*) (Cheng et al., 2017; Khoury et al., 2014).

Penelitian ini memfokuskan bahasan pada sisi penyediaan (*supply*) pangan dengan melihat aspek penganekaragaman pangan dari kebijakan Food Estate sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Secara global, riset membuktikan bahwa kebijakan berupa penyediaan bahan pangan yang berkualitas dan beragam kerap berbenturan dengan kebijakan yang bertujuan pertumbuhan

ekonomi (Baker et al., 2014; Billings et al., 2021b; Margulis, 2013; Thow et al., 2018). Benturan yang disebabkan oleh perbedaannya tujuan dan objektif dari kebijakan yang lintas sektor menghasilkan inkoherensi kebijakan (Hoebink et al., 2005; Hommels et al., 2013). Padahal, koherensi kebijakan merupakan prioritas ke 17 dalam Sustainable Development Goals (United Nation, 2015).

Tinjauan Teoritis

Koherensi kebijakan menjadi tujuan yang sangat penting dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan (Nilsson et al., 2012). Tuntutan untuk pembuatan kebijakan yang lebih koheren sering dibuat dengan mengacu pada interkoneksi yang semakin kuat antara ekonomi yang berbeda, bidang kebijakan sosial dan lingkungan, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih cerdas. Analisis koherensi kebijakan telah disebutkan merupakan alat yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan (Parsons & Hawkes, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa koherensi dalam perencanaan dan aksi di dalam dan di seluruh sektor yang relevan pada pangan dan gizi adalah kunci kemajuan yang signifikan dalam mengurangi masalah-masalah terkait malnutrisi (Heidkamp et al., 2021). Oleh sebab itu, koherensi menjadi penting untuk diinvestigasi lebih dalam adalah tingkat keselarasan antara kebijakan dan program.

Penentu utama yang mendasari pemenuhan gizi yang cukup adalah akses ke makanan bergizi yang cukup, lingkungan yang sehat, akses ke layanan kesehatan, dan praktik perawatan yang memadai untuk anak dan ibu (FAO, 2020). Namun, penyebab mendasar ini dipengaruhi oleh serangkaian masalah yang mendasar, seperti lingkungan politik, kesetaraan gender, dan sumber daya ekonomi. Intervensi gizi datang dari pendekatan di banyak sektor, hal ini yang bertujuan untuk

memberikan dampak pada pada determinan gizi yang paling dasar atau disebut sebagai intervensi nutrition-sensitive , sedangkan intervensi nutrition-specific khusus berperan untuk dapat memengaruhi determinan langsung dari malnutrisi. Pertanian sangat penting bagi status gizi, baik sebagai penentu langsung konsumsi pangan rumah tangga maupun melalui perannya dalam mata pencaharian dan sistem pangan. Terdapat pemahaman yang berkembang bahwa pembangunan pertanian memberikan titik masuk yang jelas dan diperlukan bagi upaya perbaikan gizi (FAO, 20114)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Koherensi Kebijakan oleh Nilsson et al (2012) untuk mengetahui koherensi dua kebijakan. Teori lainnya yang digunakan adalah teori Segitiga Kebijakan (Policy Triangle) oleh Walt and Gilson (1994) yang digunakan sebagai kerangka sekaligus pisau analisis dalam melihat aspek aktor, proses, konteks dan konten dari kebijakan yang kemudian digali dengan sejumlah pertanyaan kritis dari Palmer and Short (1994). Penelitian ini juga menggunakan Teori Kerangka Koalisi Advokasi (Advocacy Coalition Framework) oleh Sabatier & Jenkins (1993) sebagai triangulasi metode untuk mengetahui sistem kepercayaan aktor masyarakat sipil terhadap kebijakan ketahanan pangan dan gizi serta pembangunan pertanian. Wawancara mendalam (n=3), mengulas dokumen kebijakan (n=5 kebijakan food estate, n=14 kebijakan ketahanan pangan dan gizi) dan studi literatur dilakukan untuk mengambil data primer maupun sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Koherensi Kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi

Tidak ditemukan objektif penganekaragaman persediaan pangan yang sesuai dengan skor pola Pangan Harapan ataupun Gizi Seimbang tertulis pada kebijakan Food Estate. Analisis koherensi kebijakan telah disebutkan merupakan alat yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan (Parsons & Hawkes, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa koherensi dalam perencanaan dan aksi di dalam dan di seluruh sektor yang relevan pada pangan dan gizi adalah kunci kemajuan yang signifikan dalam mengurangi masalah-masalah terkait malnutrisi (Heidkamp et al., 2021). Untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan terkait target gizi kesehatan masyarakat, studi terkini memberikan penekanan khusus pada pentingnya ‘enabling environment’ (Billings et al., 2021a; Du Plessis et al., 2018; Gillespie et al., 2019), yang didefinisikan sebagai proses politik dan kebijakan yang membangun dan mempertahankan tujuan untuk dapat mengimplementasi kebijakan yang efektif dalam rangka mengurangi semua bentuk malnutrisi. Hal ini membutuhkan koherensi kebijakan yang maksimal, yang memerlukan aspek “konsistensi” dan hasil yang selaras dan harmonis di seluruh bidang dan sektor kebijakan tanpa mengorbankan tujuan di sektor lainnya (Dubé et al., 2014; Huttunen et al., 2014).

Nihilnya objektif atau indikator-indikator terkait penganekaragaman penyediaan pangan pada kebijakan food estate, merupakan tantangan bagi praktisi, peneliti maupun mahasiswa gizi kesehatan masyarakat bagaimana bersama dengan pembuat kebijakan pembangunan ekonomi, atau pertanian, untuk bersama menentukan objektif dan menjaga objektif penganekaragaman penyediaan pangan pada kebijakan lintas sektor tetap berlanjut. Praktisi juga akademisi gizi kesehatan masyarakat turut dalam memantau, mengawasi dan terlibat dalam pembentukan kebijakan terkait sistem pangan, agar dapat membawa agenda penganekaragaman pangan pada kebijakan-kebijakan sektor

lain, demi mencapai kualitas pangan yang lebih baik, tanpa mengabaikan tujuan pembangunan ekonomi (McDermott et al., 2015). Perlunya ada peningkatan partisipasi oleh masyarakat sipil yang berfokus pada gizi dan kesehatan masyarakat, agar agenda penganekaragaman pangan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi bisa terus masuk dalam dengan forum-forum ekonomi atau pertanian. Ilmu gizi kesehatan masyarakat perlu kembali terhubung dengan determinan-determinan sosial serta lingkungan, jika tidak, kecanggihan ilmu gizi dan kesehatan masyarakat akan terus irrelevan dengan kebijakan-kebijakan yang ada (Lang, 2005)

Keterkaitan Variabel Aktor, Proses dan Konteks dengan Variabel Koherensi Kebijakan: Analisis Kebijakan dengan Model Segitiga Kebijakan

Hal yang hendak dijelaskan pada pembahasan dengan pisau analisis Walt dan Gilsonn ini adalah, mengapa terjadi inkoherensi kebijakan Food Estate terhadap kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi? Berdasarkan hasil temuan, peran praktisi gizi kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam proses pembuatan kebijakan Food Estate. Menurut Ruel & Alderman (2013), keterlibatan banyak sektor dalam suatu program atau kebijakan menunjukkan terdapat banyak agenda yang ingin dipertahankan di dalamnya. Pihak privat mempunyai banyak peran dalam proses pembuatan kebijakan ini food estate. Terlibatnya PISAgro baik secara global hingga nasional, menambah pihak yang tergabung dalam sebuah proses yang sangat kompleks. Proses pembuatan kebijakan menjadi arena pertarungan masing-masing aktor dalam rangka mempertahankan agenda masing-masing. Pada proses ini, pembuat kebijakan perlu memikirkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti kelayakan, prioritas pemangku kepentingan, dampak kesehatan, serta pertimbangan sosial-politik. Di tengah upaya memperjuangkan agenda tersebut, keterlibatan aktor yang

membawa agenda penganekaragaman ketersediaan pangan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, tidak ditemukan. Nihilnya *Nutrition Champion* menjadi salah satu alasan mengapa objektif gizi tidak tertulis dalam kebijakan Food Estate, sebab tidak cukup kehadiran aktor yang mempertahankan agenda gizi pada proses kebijakan Food Estate. *Nutrition Champion* adalah individu/kelompok yang menggunakan platform dan pengaruh mereka untuk memposisikan gizi sebagai prioritas politik utama di skala global, tingkat regional, nasional maupun lokal. *Nutrition Champion* merupakan bagian integral dalam membangun dan mempertahankan komitmen politik untuk gizi (Scaling Up Nutrition & Transform Nutrition, 2020)

Pada aspek Proses Kebijakan, ditemukan bahwa proses pembuatan kebijakan Food Estate pada tahap Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan dilaksanakan pada rapat terbatas. Hal ini yang mungkin dapat menjadi alasan mengapa tidak ada target serta indikator yang tertera pada kebijakan Food Estate. Padahal, dengan berfokus pada faktor-faktor seperti undang-undang dan peraturan, serta komitmen politik untuk tujuan tertentu, kebijakan ketahanan pangan dan gizi dan program yang dihasilkan dapat diubah dan ditingkatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan yang *evidence-informed* telah meningkatkan kesehatan populasi selama beberapa dekade; namun memang, dalam banyak konteks, sebagian besar hambatan terjadi karena kurangnya keterlibatan aktor pembawa evidence dalam hal kesehatan masyarakat, berperan dalam proses penetapan agenda maupun formulasi kebijakan (Fielding & Briss, 2006; Reeve et al., 2021).

Pada aspek konteks faktor Situasi berupa pandemi covid-19 meningkatkan kemungkinan akan terjadinya kerawanan pangan. Narasi awal yang berkembang mengenai Food Estate pun demikian, bahwasanya Food Estate dibentuk untuk

mengantisipasi peringatan FAO. Hal ini menjadi berkaitan dengan faktor Struktural mengenai disahkannya UU Cipta Kerja sebab disebutkan bahwa salah satu alasan UU Cipta Kerja dalam rangka pemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Kebijakan Food Estate lahir melalui Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudian, PSN juga terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diketahui selama terjadinya pandemi, kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Maka dibentuklah program PEN yang merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya memberikan dukungan untuk dunia usaha. Disebutkan dalam kebijakan yang mengatur PEN, bahwa PSN termasuk dalam program yang didukung oleh PEN. Dalam situasi darurat seperti pandemi, setiap negara mengeluarkan upaya dan strategi masing-masing, Food Estate merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah ketika pandemi.

Triangulasi Metode: Analisis Sistem Kepercayaan dengan Kerangka Koalisi Advokasi

Teori Kerangka Koalisi Advokasi bergargumen bahwa, seseorang (atau sekelompok orang) berusaha mewujudkan keyakinannya dalam sebuah bentuk kebijakan. Peneliti menggunakan teori ini sebagai triangulasi metode untuk memahami sistem kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat sipil yang menolak kebijakan Food Estate. Dari hasil wawancara, diketahui 3 level sistem kepercayaan OMS Sistem kepercayaan ini yang menjadi dasar terbangunnya pendapat dan keyakinan mengenai ketahanan pangan dan gizi serta pandangan terhadap Food Estate. Sistem kepercayaan ini yang menjadi dasar bangunan argumen aktor kebijakan. Peneliti memetakan argumen organisasi masyarakat sipil ke dalam enam tema besar, yaitu Demokrasi Pangan, Pembangunan Pertanian Alternatif, Produsen Pangan, Pangan Lokal, Pangan Beragam, dan Kelestarian Hutan & Lingkungan.

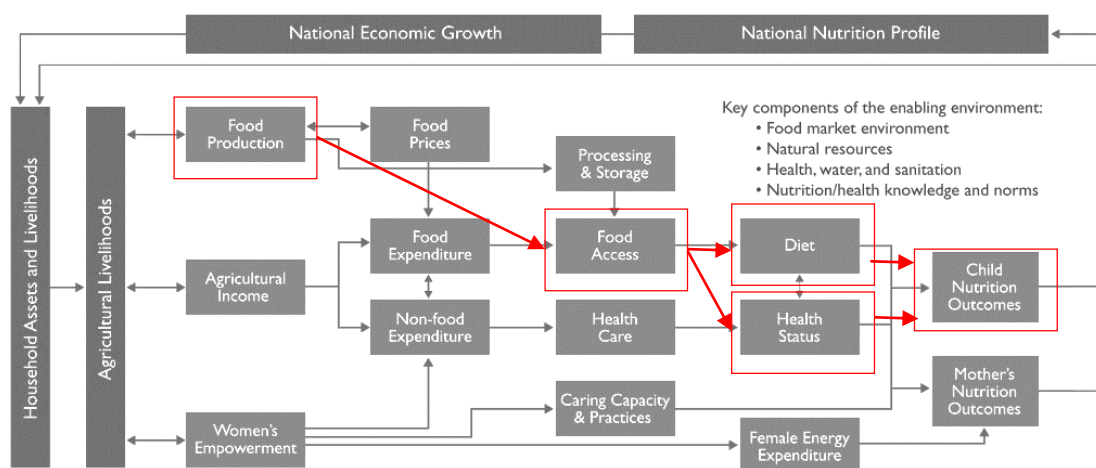


Figure 1. Pathway Argumen Organisasi Masyarakat Sipil

Menggunakan skema yang dibuat oleh Harris & Herforth (2012), didapatkan *Production-Own Consumption Pathways* merupakan skema yang dapat menjelaskan

bagaimana argumen OMS dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. *Pathway* ini, menggarisbawahi keterkaitan antara kepemilikan produksi pangan akan

meningkatkan konsumsi pangan. *Pathway* ini menggambarkan bagaimana petani skala kecil memproduksi pangan untuk tujuan untuk konsumsi rumah tangga untuk mengamankan akses ke pangan terlebih dahulu. Kelebihan *pathway* ini adalah, ketika petani sudah memenuhi keperluan pangannya terlebih dahulu, hasil pertanian juga dapat dijual, sehingga petani mendapatkan tambahan pendapatan. Maka *Income-Food Purchase Pathway* juga dimungkinkan bekerja pada *pathway* ini. *Key components of enabling environment* akan mempengaruhi bagaimana petani mengambil keputusan. Misalnya, bagaimana akses petani pada *natural resources* akan sangat memengaruhi kegiatan produksi petani. *Pathway* ini

menunjukkan bahwa *production own* dapat berperan pada peningkatan akses pangan dan akhirnya dapat meningkat status gizi.

Selanjutnya, didapatkan enam tema besar yang menjadi alasan pemerintah mengapa Food Estate dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Enam tema tersebut adalah Swasembada Pangan, Stabilitas Pasokan dan Harga, Perdagangan dan Ekonomi, Pertanian Modern untuk Kesejahteraan Petani, Upaya Penganekaragaman Pangan, dan Menjadi Lumbung Pangan Dunia. Berdasarkan tema argumen yang dikeluarkan pemerintah, peneliti mencoba memahami melalui *pathway* apa argumen pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Hal ini digambarkan dalam skema berikut,

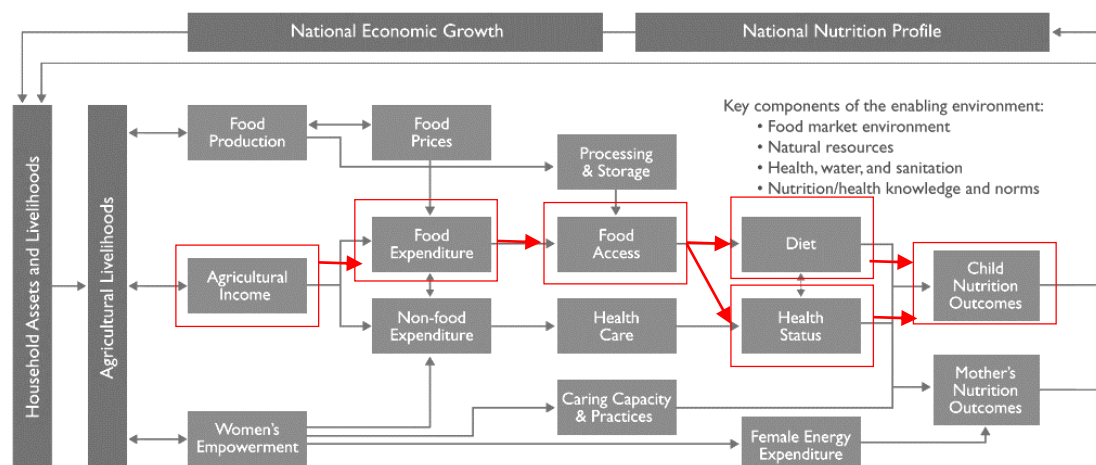


Figure 2. Pathway Argumen Pemerintah

Income-Food Purchase Pathways merupakan skema yang dapat menjelaskan bagaimana argumen pemerintah terhadap Food Estate dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. *Pathway* ini, menggarisbawahi keterkaitan antara pendapatan dan konsumsi pangan. Petani menggunakan pendapatan untuk membeli bahan pangan. Kelebihan *pathway* ini adalah, pendapatan yang dimiliki oleh petani dapat dikeluarkan untuk pembiayaan yang lain, misalnya untuk layanan kesehatan. *Key components of enabling environment* akan mempengaruhi

bagaimana petani mengambil keputusan. Misalnya, bagaimana petani memutuskan membeli bahan pangan, akan sangat tergantung dengan tingkat pengetahuan mengenai pentingnya pengetahuan mengenai gizi yang baik, bahwa konsumsi pangan harian haruslah cukup secara kuantitas, bergizi serta beragam. *Pathway* ini menunjukkan bahwa *agricultural income* dapat berperan pada peningkatan akses pangan dan akhirnya dapat meningkatkan status gizi.

Baik Masyarakat Sipil dan Pemerintah, memiliki tujuan akhir yang

sama, yaitu mencapai Ketahanan Pangan, seperti yang disebutkan oleh salah satu informan,

“kita setuju pak bahwa kita harus tahan pangan, semua negara pasti menginginkan itu, semua presiden pasti punya cita-cita itu, pemerintah juga sama..”

Kedua pathway yang digambarkan berdasarkan argumen masing-masing pihak menunjukkan bahwa terdapat beberapa jalur untuk mencapai status gizi yang baik. *Pathway* manapun akan mengantarkan kita pada tujuan yang sama. Agar tujuan tercapai dengan baik, implementasi kebijakan atau program hendaknya merujuk pada *Synthesis Of Guiding Principles On Agriculture Programming For Nutrition* yang sudah dirumuskan FAO (2013), yaitu 1) pada tahap *planning*, hendaknya para aktor yang terlibat melakukan asesmen konteks dengan indikator *do no harm*, menetapkan *nutrition objectives* sejak tahap perencanaan, memaksimalkan potensi dan kesempatan, melakukan koordinasi multisektoral, serta membuka akses yang adil pada sumber daya, 2) pada tahap *implementation*, poin yang harus jadi perhatian adalah adalah penganekaragaman produksi pangan, peningkatan produksi pangan yang tinggi kandungan gizi seperti buah, sayur, sumber hewani, kacang-kacang serta pangan spesifik lainnya, menekan *food loss* pada proses produksi pangan, pemberdayaan perempuan, peningkatan pendidikan gizi, serta manajemen sumber daya yang baik, 3) aspek *supporting* berjalan pada proses *planning* maupun *implementation*, secara bersamaan, upaya yang dilakukan pada aspek *supporting* ini adalah memantau koherensi kebijakan, menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pelaku sistem pangan, serta menerapkan komunikasi dan advokasi yang efektif. Dengan melakukan penekanan perhatian pada aspek *planning*, *implementation* dan *supporting*, diharapkan tujuan berupa

peningkatan status gizi melalui pertanian dapat terwujud.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa koherensi Kebijakan Food Estate dengan Kebijakan Ketahanan Pangan dalam hal penganekaragaman persediaan pangan cukup baik namun belum optimal, sebab tidak ditemukan objektif penganekaragaman persediaan pangan yang sesuai dengan skor pola Pangan Harapan ataupun Gizi Seimbang tertulis pada kebijakan Food Estate. Inkoherensi ini disebabkan oleh aktor kebijakan, faktor situasional, struktural dan eksogen pada konteks, serta tahapan proses pembuatan kebijakan Food Estate berhubungan erat dan saling mempengaruhi koherensi kebijakan.

Analisis Kerangka Koalisi Advokasi menjelaskan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah, yaitu mencapai ketahanan pangan, namun OMS memiliki kepercayaan yang berbeda mengenai pendekatan yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Daftar Referensi

- Ahmad Arif. (2021, December 30). Sistem Pangan Kepulauan Harus Berbasis Keragaman Lokal - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/30/sistem-pangan-kepulauan-harus-berbasis-keragaman-lokal>
- Arimond M, Wiesmann D, Becquey E, Carriquiry A, Daniels MC, Deitchler M, Fanou-Fogny N, Joseph ML, Kennedy G, Martin-Prevel Y, et al. (2010). Simple food group diversity indicators predict micronutrient adequacy of women's diets in 5 diverse, resource-poor settings. *Journal of Nutrition*, 140(11):20. <https://doi.org/10.3945/jn.110.123414>
- Badan Ketahanan Pangan. (2020). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2020. Badan Ketahanan Pangan. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/12042>
- Badan Ketahanan Pangan. (2021). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2021 (B. Hariyanto, M. Sugiati, S.TP., M. S. Anggit Gantina, SP, M. G. Wara Fitria Tristiyanti, SP, M. S. Riza, SP, S. K. Jayanti Wisnu Wardhani, & S. S.

- Rosita Ria Rusesta (eds.); Vol. 3, Issue Tahun 2020). Badan Ketahanan pangan.
- Badan Pengawas Keuangan. (2022, April 7). Laporan Pemeriksaan Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate. Warta Pemeriksa. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=34151>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Stunting Summit: Komitmen Bersama Turunkan Prevalensi Stunting di Indonesia | Kementerian PPN/Bappenas. <https://bappenas.go.id/index.php/id/berita/stunting-summit-komitmen-bersama-turunkan-prevalensi-stunting-di-indonesia>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama, 2010-2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2016/imp-or-biji-gandum-dan-meslin-menurut-negara-asal-utama-2010-2017.html>
- Badie, B., Berg-Schlosser, D., Morlino, L., & Cheung, P. T. Y. (2012). Policy Cycle. *International Encyclopedia of Political Science*. <https://doi.org/10.4135/9781412959636.n442>
- Baker, P., Kay, A., & Walls, H. (2014). Trade and investment liberalization and Asia's noncommunicable disease epidemic: a synthesis of data and existing literature. *Globalization and Health*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/S12992-014-0066-8>
- Baltussen, R., Knai, C., & Sharan, M. (2004). Iron fortification and iron supplementation are cost-effective interventions to reduce iron deficiency in four subregions of the world. *The Journal of Nutrition*, 134(10), 2678–2684. <https://doi.org/10.1093/JN/134.10.2678>
- Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif, Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Mitra Wacana Media.
- Barilla Center for Food and Nutrition. (2021). Country profiles: Indonesia. <https://foodsustainability.eiu.com/country-profile/id/>
- Billings, L., Pradeilles, R., Gillespie, S., Vanderkooy, A., Diatta, D., Toure, M., Diatta, A. D., & Verstraeten, R. (2021a). Coherence for nutrition: insights from nutrition-relevant policies and programmes in Burkina Faso and Nigeria. *Health Policy and Planning*, 1–19. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab108>
- Billings, L., Pradeilles, R., Gillespie, S., Vanderkooy, A., Diatta, D., Toure, M., Diatta, A. D., & Verstraeten, R. (2021b). Coherence for nutrition: insights from nutrition-relevant policies and programmes in Burkina Faso and Nigeria. *Health Policy and Planning*, 36(10), 1574–1592. <https://doi.org/10.1093/HEAPOL/CZAB108>
- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making Health Policy. Kent Buse, Nick Mays and Gill Walt. 288. https://books.google.com/books/about/Making_Health_Policy.html?hl=id&id=LL1M4IOzXtwC
- Cardno, C. (2018). Policy document analysis: A practical educational leadership tool and a qualitative research method. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 24(4), 623–640. <https://doi.org/10.14527/kuey.2018.016>
- Catherine, A., Bridgman, P., & Davis, G. (2007). *The Australian policy handbook*. Allen & Unwin, 2007 xii, 268 p. : ill. ; 23 cm.
- Cheng, A., Mayes, S., Dalle, G., Demissew, S., & Massawe, F. (2017). Diversifying crops for food and nutrition security – a case of teff. *Biological Reviews*, 92(1), 188–198. <https://doi.org/10.1111/BRV.12225>
- Clavier, C., & D, L. E. (2013). *Health Promotion and the Policy Process*. Oxford University Press.
- Corvalán, C., Reyes, M., & Garmendia, M. (2013). Structural responses to the obesity and non-communicable diseases epidemic: the Chilean Law of Food Labeling and Advertising. *Obes Rev*, 14, Suppl. 2,79–87.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- DPR-RI. (2021a). *Pengawasan Pelaksanaan Food Estate di Kecamatan Dadahub Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*.
- DPR-RI. (2021b). *Pengawasan Pelaksanaan Program Food Estate Berbasis Holtikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara*. In *Laporan kunjungan kerja spesifik komisi IV DPR RI*.
- Du Plessis, L. M., McLachlan, M. H., & Drimie, S. E. (2018). What does an enabling environment for infant and young child nutrition look like at implementation level? Perspectives from a multi-stakeholder process in the Breede Valley Sub-District, Western Cape, South Africa. *BMC Public Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/S12889-018-5165-7/TABLES/1>
- Dubé, L., Addy, N. A., Blouin, C., & Drager, N. (2014). From policy coherence to 21st century convergence: a whole-of-society paradigm of human and economic development. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1331(1), 201–215. <https://doi.org/10.1111/NYAS.12511>
- FAO. (2013). *Synthesis of guiding principles on agriculture programming for nutrition*. <http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e.pdf>

- FAO. (2021). Food and Nutrition Security Country Profiles: Indonesia. FAO Publications Catalogue 2021. <https://doi.org/10.4060/CB4402EN>
- FAO, & WFP. (2020). FAO-WFP early warning analysis of acute food insecurity hotspots. <https://doi.org/10.4060/cb1907en>
- Fielding, J. E., & Briss, P. A. (2006). Promoting evidence-based public health policy: can we have better evidence and more action? *Health Affairs (Project Hope)*, 25(4), 969–978. <https://doi.org/10.1377/HLTHAFF.25.4.969>
- Gayer, J., & Smith, G. (2015). Micronutrient Fortification of Food in Southeast Asia: Recommendations from an Expert Workshop. *Nutrients*, 7(1), 646. <https://doi.org/10.3390/NU7010646>
- George, M. W. (2008). The elements of library research: What every student needs to know. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*, 1–201. <https://doi.org/10.5860/choice.46-4758>
- Gillespie, S., van den Bold, M., & Hodge, J. (2019). Nutrition and the governance of agri-food systems in South Asia: A systematic review. *Food Policy*, 82(October 2018), 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.10.013>
- Gitz, V., Meybeck, A., Ickowitz, A., McMullin, S., Vinceti, B., Powell, B., Termote, C., Jamnadass, R., Dawson, I., & Stadlmayr, B. (2021). Contribution of forests and trees to food security and nutrition. 5. <https://doi.org/10.17528/cifor/008006>
- Ham, C., & Hill, M. (1984). *The Policy Process in the Modern Capitalist State*. Harvester Wheatsheaf.
- Harirah, Z. (2019). Kerangka Advokasi Koalisi dalam Kebijakan Penataan Pemukiman Bantaran Sungai Winongo di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 128. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7065>
- Harris, J., & Herforth, A. (2012). FROM AGRICULTURE TO NUTRITION: PATHWAYS AND PRINCIPLES Feed the Future Nutrition Global Learning and Evidence Exchange (N-GLEE). https://www.spring-nutrition.org/sites/default/files/1.6_glee_presentation_pathways_and_principles_harris.pdf
- Hartono, D. N. (2021). Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Table of Content.
- Heidkamp, R. A., Piwoz, E., Gillespie, S., Keats, E. C., D'Alimonte, M. R., Menon, P., Das, J. K., Flory, A., Clift, J. W., Ruel, M. T., Vosti, S., Akuoku, J. K., & Bhutta, Z. A. (2021). Mobilising evidence, data, and resources to achieve global maternal and child undernutrition targets and the Sustainable Development Goals: an agenda for action. *Lancet (London, England)*, 397(10282), 1400–1418. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00568-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00568-7)
- Herforth, A., & Harris, J. (2014). Understanding and applying primary pathways and principles. <http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll5/id/4570>
- HLPE. (2020). Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative towards 2030. High Level Panel of Experts, 112. <http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf>
- Hoebink, P., Deuss, M., De Haas, H., & Wagemans, G. (2005). The Coherence of EU Policies: Perspectives from the North and the South. 007(January 2005).
- Hommels, A., Egyedi, T. M., & Cleophas, E. (2013). Policy Change and Policy Incoherence: The Case of Competition Versus Public Safety in Standardization Policies. *Journal of European Integration*, 35(4), 443–458. <https://doi.org/10.1080/07036337.2012.711826>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy; Policy Cycles And Policy Subsystems: Policy Cycles And Policy Subsystems*. In *Studying public policy: policy cycles and policy subsystems (Pertama)*. Oxford University Press.
- Hupe, P. L., & Hill, M. J. (2007). *The Three Action Level of Governance: Re-framing the Policy Process Beyond the Stages Model* - Google Books. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Policy*. SAGE.
- Huttunen, S., Kivimaa, P., & Virkamäki, V. (2014). The need for policy coherence to trigger a transition to biogas production. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 12, 14–30. <https://doi.org/10.1016/J.EIST.2014.04.002>
- Jann, W., & Wegrich, K. (2017). *Theories of the Policy Cycle* - Google Books. In F. Fischer & G. J. Miller (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Method*. Routledge.
- Kent Buse, N. M. & G. W. (2012). Making Health Policy. In *Making Health Policy*.
- Khoury, C. K., Bjorkman, A. D., Dempewolf, H., Ramirez-Villegas, J., Guarino, L., Jarvis, A., Rieseberg, L. H., & Struik, P. C. (2014). Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111(11), 4001–4006. https://doi.org/10.1073/PNAS.1313490111/SUPPL_FILE/ST01.DOC
- Kulaç, O., & Özgür, H. (2017). An Overview of the Stages (Heuristics) Model as a Public Policy Analysis Framework. *European Scientific Journal*, 7881(May), 1857–7881.
- Lachat C, Raneria JE, Smitha KW, Kolsterena P, Van Dammec P, Verzelenc K, Penafielc D, Vanhovec W, Kennedy G, Hunter D, et al. (2018). Dietary species richness as a measure of food biodiversity and nutritional quality of diets. *PNAS*, 115(1):127. <https://doi.org/10.1073/pnas.1709194115>
- Lang, T. (2005). Food control or food democracy? Re-engaging nutrition with society and the

environment. *Public Health Nutrition*, 8(6a), 730–737. <https://doi.org/10.1079/PHN2005772>

Larsen, H. G., & Adu, P. (2021). The Theoretical Framework in Phenomenological Research: Development and Application. In *The Theoretical Framework in Phenomenological Research: Development and Application*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003084259>

Leichter, H. (1979). *A Comparative Approach to Policy Analysis: Health Care Policy in Four Nations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mahmudiono T, S. M. dan R. R. (2017). NoHousehold dietary diversity and child stunting in East Java, Indonesia. *Asia Pacific. Journal of Clinical Nutrition*, 26(2):317–. <https://doi.org/10.6133/apjcn.012016.01>

Margulis, M. E. (2013). The regime complex for food security: Implications for the global hunger challenge. *Global Governance*, 19(1), 53–67. <https://doi.org/10.1163/19426720-01901005>

Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. In Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

McDermott, J., Johnson, N., Kadiyala, S., Kennedy, G., & Wyatt, A. J. (2015). Agricultural research for nutrition outcomes – rethinking the agenda. *Food Security*, 7(3), 593–607. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0462-9>

Mehraban, N., & Ickowitz, A. (2021). Dietary diversity of rural Indonesian households declines over time with agricultural production diversity even as incomes rise. *Global Food Security*, 28, 100502. <https://doi.org/10.1016/J.GFS.2021.100502>

Muhardiono, I., & Hamdani, A. (2021). Flood vulnerability impact for food estate potential in Central Kalimantan, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 648(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/648/1/012025>